



JURNAL KAJIAN BALI

Journal of Bali Studies

p-ISSN 2088-4443 # e-ISSN 2580-0698
Volume 11, Nomor 02, Oktober 2021
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali>

Terakreditasi Sinta-2, SK Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan
Kemenristekdikti No. 23/E/KPT/2019



Pusat Penelitian Kebudayaan dan Pusat Unggulan Pariwisata
Universitas Udayana

Identitas Naratif Aktivistis Perempuan: Rekonstruksi Pengalaman dan Orientasi dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Bali

I Made Anom Wiranata*¹ dan Penny Kurnia Putri²

^{1,2}Universitas Udayana

ABSTRACT

Narrative Identity of Women Activists: Reconstruction of Experience and Orientation in the Gender Equality Movement in Bali

The struggle to change patriarchal ideology towards gender equality in Bali requires commitment, energy, and time. A number of women in Bali took positions and actions to be intensively engaged in the gender equality movement. The purpose of this research is to understand the narrative identity of gender equality activists in Bali. With phenomenology method, this study finds that the motivation to engage in the gender equality movement stems from the interpretation of personal observations on cases of discrimination and marginalization of women in their respective environments. This meaning becomes the basis of their identity as women activists. Political reforms and affirmative policies towards women are seen by them as opportunities to start taking part in or enlarging the gender equality movement. The meaning of self and value orientation underlies the choice to focus on the movement segment which includes gender education, legal case assistance, and socialization of gender equality norms.

Keywords: narrative identity, gender equality, movement, phenomenology

1. Pendahuluan

Fase penting dalam pembentukan norma internasional tentang kesetaraan gender adalah terbentuknya Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konvensi yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh PBB, kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984. Kemudian, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam

* Penulis Koresponden: anom_wiranata@unud.ac.id
Diajukan: 1 Agustus 2021; Diterima: 18 September 2021

Pembangunan Nasional. Selanjutnya, UU No. 12 Tahun 2003 diterbitkan sebagai bagian dari kebijakan afirmasi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan langkah-langkah mengatasi ketidaksetaraan gender dan langkah-langkah afirmatif yang diperlukan.

UU No. 12 Tahun 2003 membuka peluang bagi perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif. Ini adalah peraturan afirmasi gender yang pertama kali menyebutkan secara spesifik angka persentase untuk perempuan yang dapat menjadi caleg. Pasal 65 (1) dari undang-undang tersebut menyatakan, "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterlibatan perempuan sekurang-kurang 30%." Meskipun undang-undang ini tidak mewajibkan parpol untuk mencalonkan 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (caleg), undang-undang ini telah mengadirkan standar perilaku yang dianggap pantas. Mencalonkan perempuan sebagai caleg dianggap sebagai perilaku yang patut. Aktivis-aktivis perempuan menaruh ekspektasi pada parpol untuk membuka pintu bagi caleg perempuan. Mereka menyebut istilah 30% kuota perempuan sebagai bentuk dorongan kepada partai politik untuk mencalonkan minimal 30% caleg perempuan.

Norma kesetaraan gender telah mendapatkan afirmasi dan payung hukum dari peraturan perundangan. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa norma kesetaraan gender itu akan terwujud dengan sendirinya. Keohane dan Nye (2000) menyebutkan bahwa norma tidak beroperasi secara otomatis tetapi melalui aktivitas agensi dalam jaringan. Jaringan perempuan (feminis) transnasional dan anggotanya di level domestik berperan sebagai promotor dan translator norma internasional. Aktivis-aktivis perempuan inilah yang melakukan berbagai jenis upaya untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai dimensi kehidupan.

Perjuangan dari aktivis gender di Bali mendapatkan tantangan yang berat. Organisasi masyarakat sipil di Bali sebelum dikeluarkannya UU No. 12 Tahun 2003, tidak memiliki basis pada isu gender. Gerakan perempuan di Bali memang sudah muncul sejak zaman kolonial Belanda (Darma Putra, 2007). Namun, ketika memasuki Orde Baru sampai dengan masa Reformasi politik di tahun 1998, tidak tampak ada gerakan perempuan Bali yang manifest. LSM-LSM di Bali saat itu lebih cenderung mengurus isu politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan. Ketika gerakan perempuan di Bali dimulai di awal tahun 2000-an, para aktivis perempuan merambah ke arena gerakan yang baru. Di samping minimnya pengalaman dalam gerakan perempuan, mereka juga harus berhadapan dengan kultur patriarki yang kuat yang menempatkan laki-laki sebagai sentral dari relasi gender.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tentang

Mereka yang yang terjun dalam gerakan gender di Bali, memutuskan dengan sadar untuk mencurahkan waktu dan sumber daya dalam gerakan perempuan. Proses mereka untuk mendefinisikan identitas mereka sebagai aktivis gerakan perempuan di Bali melibatkan proses konstruksi makna dan pergulatan dalam diri subjek.

Artikel bertujuan untuk membahas identitas naratif dari para aktivis perempuan di Bali. Identitas naratif adalah pemahaman tentang diri yang disampaikan dalam bentuk cerita yang terinternalisasi dan terus berkembang. Melalui narasi itu, seseorang mengkonstruksikan makna atas hidupnya (McAdams, 2011). Dalam identitas naratif aktivis perempuan Bali, urutan cerita dalam narasi memberikan pemahaman tentang proses seseorang menjadi aktivis perempuan dan cara hidup tertentu, tindakan yang dilakukan saat ini, dan tujuan yang ingin dicapai dan nilai-nilai yang dianut.

2. Kajian Pustaka

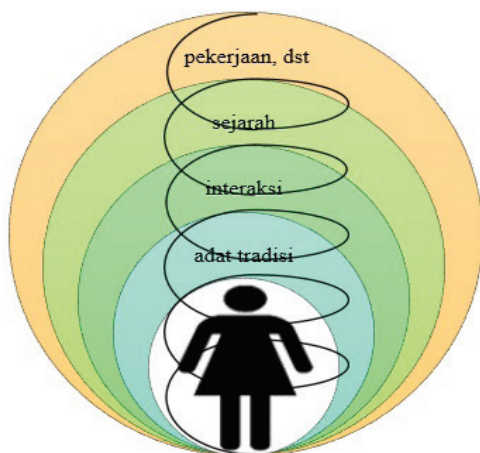
Artikel ini menekankan pada identitas naratif sehingga memberikan sudut pandang yang berbeda dengan kajian tentang perempuan Bali yang selama ini cenderung menekankan pada sisi diskriminasi dan kekerasan serta budaya patriarki sebagai sumber penyebabnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Nakatani (2003) bahwa perempuan Bali memiliki beban jamak yang mencakup beban tugas rumah tangga, beban ekonomi, dan beban ritual adat atau keagamaan. Ideologi patriarki itu adalah sebab dari partisipasi perempuan dalam politik yang rendah di Bali (Parmiti, 2017; Kartika, 2017). Kajian budaya patriarki juga dinyatakan melalui karya Dewi, Erviantono, dan Bandiyah (2017) yang membahas tentang hasil karya sastra Oka Rusmini yang melakukan kritik atas konstruksi budaya di Bali yang telah memarginalkan perempuan. Secara khusus terkait partai politik, Gelgel dan Apriani (2019), menjelaskan bahwa ideologi patriarki di Bali mewujudkan dalam diskriminasi perempuan dalam mesin partai politik dan turunannya. Sedangkan pada ranah rumah tangga, hasil penelitian dari Ariyanti dan Ardhana (2020) menunjukkan adanya kekerasan sebagai dampak budaya patriarki.

Ada pula penelitian dari Suprpta (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan modal ekonomi dan pengetahuan sebagai faktor yang menyebabkan keberhasilan politisi perempuan untuk keluar dari zona marginalisasi. Terkait dengan politisi perempuan yang menjadi anggota legislatif, Sukiada (2018) menyatakan bahwa keberhasilan mereka tersebut lebih banyak disebabkan oleh kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam politik dan dukungan dari lingkungan terdekatnya yaitu suami dan keluarganya, dibandingkan dengan kapasitas politisi perempuan. Studi-studi ini lebih melihat faktor eksternal sebagai penyebab dari kiprah dan keberhasilan politisi perempuan. Mereka

melewatkan pentingnya pemahaman diri dari aktivis perempuan (baik politisi maupun LSM) dalam keterlibatannya di arena gerakan kesetaraan Penelitian ini menambah khasanah pengetahuan tentang identitas perempuan Bali seperti yang dilakukan oleh Kurniasari (2019) yang membahas tentang pemaknaan identitas diri sebagai perempuan Hindu di Bali dalam perannya sebagai komunikator politik. Berbeda dengan karya Kurniasari tersebut, studi ini berfokus pada aktivis perempuan di Bali sebagai subjek yang identitasnya tidak dibatasi sebagai komunikator politik dan beragama Hindu, namun mencakup pendefinisian identitas yang terbuka sebagai aktivis perempuan sesuai dengan sudut pandang dan pengalaman keseharian subjek yang bersangkutan.

3. Teori dan Metode

Dari perspektif Heidegger, tokoh teori fenomenologi, kesadaran manusia tersebut terbentuk dari pengalaman-pengalaman dalam berelasi dengan dunianya (Riyanto, 2018). Dunia dalam konteks ini bukanlah lokasi geografis, namun merujuk pada seluruh keadaan atau konteks yang mempengaruhi eksistensi total dari seseorang. Manusia tidak hanya berada di dalam dunianya namun memiliki relasi dengan dunianya, melahirkan kesadaran-kesadaran baru tentang dunia kesehariannya. Manusia menjadi pembentuk dan pengelola dari sejarahnya di dunianya. Relasi tersebut menciptakan makna bagi subjek yang kemudian membentuk eksistensinya secara akumulatif secara spiral, bukan linear. Antara satu lapisan makna (dari hasil relasi dengan dunianya) dengan lapisan makna lainnya berjejalin dalam memberikan dampak pada kesadaran subjek. Makna dari subyek sering tersembunyi sehingga peran dari fenomenologi adalah membuka struktur kesadarannya (Riyanto, 2018) (Gambar 1).



Gambar 1: Relasi subjek dengan dunianya (Sumber: Diadaptasi dari Riyanto, 2018)

Ada kehadiran *self* (sang diri) ketika subyek berinteraksi dengan dunianya (Laitinen, 2002). Sang diri adalah produk dari interpretasi dan pengorganisasian hidup seseorang. Ketika kita bicara tentang identitas, pertanyaan yang umum diajukan adalah, “Siapakah Aku”? Pertanyaan seperti ini sebenarnya tidak dapat terjawab dengan hanya menyebutkan nama dan kategori. Identitas kita ditentukan oleh komitmen dan identifikasi yang memberikan kita bingkai atau horizon yang dengannya kita dapat menentukan sesuatu atau hal yang bernilai atau layak diperhatikan. Horizon tersebut juga menentukan tentang sesuatu yang kita dukung ataupun sesuatu yang kita lawan. Dengan kata lain identitas adalah horizon yang dengannya kita mampu untuk mengambil suatu pendirian. Seperti yang dinyatakan oleh Taylor, “*To know who I am is a species of knowing where I stand*” (Taylor, 1989).

Identitas naratif memberikan wawasan tentang sifat-sifat karakter kita, tujuan yang kita kejar, nilai-nilai yang kita dukung, dan cara hidup kita yang berbeda. Dalam kerangka naratif dan urutan temporal ini, kisah kehidupan terus dikonstruksi ulang oleh semua cerita yang diceritakan subjek tentang dirinya sendiri. Hidup kita mengalami proses konfigurasi ulang yang konstan. Hidup itu sendiri, seperti yang dirumuskan oleh Ricoeur, adalah “kain cerita yang ditenun” (Ricoeur, 1988).

Selaras dengan teori fenomenologi, penelitian ini menggunakan metode fenomenologi yang merupakan cara untuk memahami makna-makna yang dikonstruksikan subjek dalam aktivitas kesehariannya (van Manen, 1990). Unit analisa dalam penelitian ini adalah individu aktivis gerakan gender yang berelasi dengan dunianya. Data dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam dengan empat aktivis gerakan kesetaraan gender di Bali. Narasumber pertama adalah Ibu Sri Wigunawati (50 tahun). Ibu Sri adalah politisi perempuan Partai Golkar yang sudah aktif dalam kegiatan partai politik sebelum Reformasi 1998. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar. Saat ini ia adalah Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Bali dan Ketua Badan Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Provinsi Bali.

Narasumber kedua adalah Ibu Nengah Budawati (47 tahun). Ibu Budawati adalah salah satu pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) dan sempat memimpin lembaga tersebut selama dua periode. Saat ini ia adalah Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tabanan dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bali Women Crisis Centre.

Narasumber ketiga adalah Ibu Luh Putu Anggreni (56 tahun). Ia pernah menjadi kepala divisi hukum dan perempuan di LBH Bali. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Bali. Saat ini ia adalah sekretaris LBH APIK Bali.

Narasumber keempat adalah Ibu Luh Riniti Rahayu (61 tahun). Ia adalah komisioner KPU Provinsi Bali periode 2003-2008. Ia adalah pendiri dan pimpinan LSM Bali Sruti yang merupakan LSM pertama di Bali yang bergerak pada isu gender.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Tumbuhnya Komitmen Aktivisme Gender

Pengalaman semasa remaja dapat menjadi titik tolak dari identitas naratif. Identitas naratif adalah cerita yang terinternalisasi dan terus berkembang tentang sang diri (McAdams, 2011). Pengalaman saat usia kecil atau remaja, dalam mengamati peristiwa diskriminasi terhadap perempuan, memberikan atensi dan tanda tanya pada narasumber hingga menginjak dewasa, seperti yang dialami oleh narasumber Budawati dan Sri Wigunawati. Ibu Budawati memiliki pengalaman semasa usia SD yang terus membayangnya hingga dewasa yaitu tentang kerabatnya yang berkasta dan menikah dengan laki-laki yang tidak berkasta. Ia sering mendengar kerabatnya tersebut yang mengeluh karena telah menjadi korban kekerasan di dalam rumah tangga. Saat itu ia bertanya-tanya tentang hal yang menyebabkan kerabatnya itu tidak memilih pulang dan tinggal di rumah asalnya. Sepengetahuannya, seorang perempuan boleh saja kembali ke rumah asalnya atau bisa juga untuk bercerai sebagai pilihan terakhir.

Sampai usia dewasa Ibu Budawati tetap bergulat dengan pertanyaan yang muncul dari pengamatannya saat ia masih kecil. Ia tidak puas dengan jawaban yang ia dengar dari lingkungan pergaulannya bahwa perempuan berkasta yang menikah ke pria *sudra* tidak dapat pulang kembali ke rumahnya, sehingga ia harus menerima apapun yang terjadi di rumah suaminya. Ia melihat bahwa perempuan yang tidak bisa kembali pulang ke rumah asalnya adalah sesuatu yang tidak adil, meskipun saat itu ia tidak mengetahui penyebab dari fenomena tersebut.

Kegelisahan dengan peristiwa tersebut, mendorongnya untuk magang di LBH Bali selepas menamatkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Dalam proses magang tersebut, ia kemudian mendapatkan pengetahuan tentang penanggalan kasta bagi perempuan berkasta yang menikah dengan laki-laki *sudra*, melalui upacara *patiwangi*. Upacara ini bertujuan untuk menghilangkan status kehormatan kasta yang ada pada mempelai perempuan agar status kastanya menjadi sama dengan mempelai laki-laki. Akibatnya, jika perempuan yang melakukan *patiwangi* tersebut kemudian bercerai, maka ia tidak dapat kembali ke rumah asal-asalnya dengan mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari keluarga tersebut. Bagi Ibu Budawati, upacara *patiwangi* ini adalah jebakan bagi perempuan. Ibu Budawati ingin melihat adanya

perubahan untuk tatanan yang lebih baik dan adil bagi perempuan. Hal inilah yang mendasarinya untuk terjun dalam aktivisme kesetaraan gender.

Yang dilakukan oleh Ibu Budawati adalah evaluasi terhadap pengalamannya yang kemudian mendorongnya untuk mengambil posisi tertentu (Foto 1). Taylor dan Ricoeur melihat evaluasi yang kuat adalah isu sentral dalam identitas (Laitinen, 2002). Bagi Taylor (1989), evaluasi yang kuat adalah isu sentral dalam interpretasi diri. Evaluasi yang kuat mengacu pada “kepantasan” dari berbagai keinginan, perasaan, tindakan, atau cara hidup. Identitas kita sebagian dibentuk oleh sesuatu yang kita hargai. Kita bercita-cita untuk, menghormati, peduli dan mengagumi cara hidup tertentu dibandingkan dengan yang lainnya (Taylor, 1989). Menginternalisasi sebuah cita-cita secara langsung berkontribusi identitas diri. “Aku” sebagian ditentukan oleh evaluasi atau orientasiku yang kuat (Taylor, 1989).



Foto 2. Ibu Budawati dalam pelatihan ekonomi kreatif untuk perempuan (Foto: Dokumentasi pribadi Ibu Budawati)

Narasumber lainnya Ibu Sri Wigunawati juga memiliki titik tolak pengalaman di kala usia remaja ketika melihat keluarga di lingkungannya yang kondisi keuangannya hanya cukup untuk membiayai satu anak untuk mengenyam pendidikan tinggi. Keluarga tersebut memprioritaskan pada pendidikan untuk anak laki-laknya. Ketika beranjak dewasa, ia kemudian mengetahui bahwa peristiwa tersebut juga terjadi banyak keluarga lainnya yang lebih memprioritaskan pendidikan untuk anak laki-laki karena predikatnya

sebagai penerus garis keturunan keluarga (*purusha*). Tidak hanya dalam hal pendidikan, perempuan juga tidak mendapat prioritas dalam mendapatkan hak waris dari kekayaan orang tuanya. Ia juga merasakan ada pandangan dalam masyarakat yang bersifat mematahkan semangat perempuan untuk berkiprah dalam ranah publik. Ia mendengarkan pembicaraan di masyarakat yang menganggap bahwa peran perempuan berada pada ranah domestik. Ia sering mendengar ungkapan, “Setinggi-tingginya perempuan bersekolah, mereka kembali untuk mengurus dapur”. Motivasi Ibu Sri untuk menjadi aktivis perempuan dalam politik adalah sebagai pembuktian bahwa perempuan mampu untuk berkiprah dalam dunia politik.

Ia yakin bahwa kehadiran perempuan dalam politik akan membuka peluang yang lebih besar untuk menghasilkan keputusan publik yang melindungi perempuan dalam segala bidang. Perempuan dalam politik yang dimaksud oleh Ibu Sri tidak hanya terbatas pada posisi anggota legislatif namun juga posisi fungsionaris partai politik dan aktivis LSM yang terlibat aktif dalam perumusan kebijakan publik. Ibu Sri yang ikut memperjuangkan UU Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), melihat bahwa UU tersebut dapat berhasil diwujudkan akibat perjuangan bersama dari politisi dan aktivis perempuan. Sebelum ada undang-undang tersebut, KDRT merupakan delik aduan. Undang-undang itu menjadikan KDRT sebagai delik umum yang membuat setiap orang dapat membuat laporan bila menemukan peristiwa KDRT.

Menurut Ibu Sri, ia termotivasi untuk terlibat dalam politik untuk mempengaruhi kebijakan publik yang melindungi perempuan, meskipun ia tidak dalam posisi sebagai anggota legislatif. Ibu Sri yang memiliki identifikasi keinginan dengan kualitas hidup perempuan, adalah contoh dari “*identification-with*” (Laitinen, 2002). Kita mengidentifikasi diri kita dengan perasaan atau keinginan atas sesuatu yang selaras dengan nilai-nilai yang kita anut (Laitinen, 2002). Nilai yang dianut oleh Ibu Sri adalah kualitas hidup dan kesetaraan bagi perempuan. Ia merasa senang misalnya ketika berhasil memperjuangkan ada fasilitas Puskesmas di suatu daerah. Ia merasa memiliki tujuan hidup dengan terus menjadi politisi perempuan selama lebih dari 20 tahun, sehingga ia dapat melobi atau mempengaruhi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan perempuan, terutama sekali untuk persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan seperti kesehatan reproduksi (Foto 2).



Foto 2. Ibu Sri Wigunawati dalam kegiatan diskusi tentang peran perempuan (Foto: Dokumentasi pribadi Ibu Sri Wigunawati).

4.2 Antara Lingkungan Pergaulan, Perubahan Politik, dan Sang Diri

Identitas naratif adalah cerita tentang diri yang terinternalisasi dan berkembang, yang dikonstruksikan oleh seseorang untuk memaknai hidupnya (McAdams, 2011). Sang aku membangun makna melalui interaksinya dengan orang lain (Gelven, 1989). Ibu Anggreni yang berasal dari Bali Utara menempuh pendidikan dan bekerja di Denpasar (Bali Selatan). Ia baru menyadari tentang persoalan diskriminasi terhadap perempuan ketika ia memiliki lingkungan pergaulan di Bali Selatan terutama di Denpasar dan Gianyar. Perjumpaannya dengan perempuan-perempuan di Bali Selatan memberikan horizon baru. Dari berbagai perbincangan, ia memiliki pertanyaan di dalam dirinya tentang perempuan-perempuan di Bali Selatan yang jarang didengar pendapatnya dan perempuan yang dinomorduakan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap perempuan di daerah asalnya yang lebih egaliter. Di keluarga asalnya di Buleleng, orang tua mempersiapkan atau membekali anak perempuannya dengan pendidikan yang tidak berbeda dengan perlakuan terhadap anak laki-laki. Bahkan di lingkungan keluarganya, ia mengambil peran kepemimpinan di antara saudara-saudaranya karena menjadi anak sulung.

Sebagai pengacara yang berkiprah di LBH Bali mulai tahun 1998, ia melihat lembaga itu memiliki karakter yang maskulin dengan berfokus pada persoalan-persoalan politik. Saat itu ia mengamati LBH Bali belum menjadikan isu gender sebagai agenda advokasi. Minatnya untuk memasuki arena isu

gender terjadi ketika ia mengikuti pertemuan antar aktivis LSM perempuan di Bali pada tahun 1999. Saat itu ada aktivis perempuan dari Jakarta yang berbicara tentang kesetaraan gender. Aktivis tersebut bercerita tentang gerakan kesetaraan gender. Pertemuan tersebut menerima gagasan tersebut dan kemudian membentuk Forum Komunikasi Mitra Kasih Bali. Ini menjadi cikal bakal gerakan kesetaraan gender di Bali. Dengan asistensi dari sejumlah aktivis yang berbasis di Jakarta, forum ini kemudian mengangkat isu “menguak isu kekerasan dalam rumah tangga”.

Interaksi dengan aktivis-aktivis gender yang berbasis di Jakarta mendorong Ibu Anggreni untuk mendalami lebih lanjut isu gender dengan mengikuti pelatihan-pelatihan gender di Jakarta secara berkelanjutan di lembaga yang bernama Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (Kapal Perempuan). Aktivisme gender menjadi dunia dari Ibu Anggreni dan keputusannya untuk mulai menekuni isu gender adalah keputusannya sendiri atas dasar kesadaran. Seperti yang dikatakan oleh Heidegger, ia telah menjadi pembentuk dan pengelola dari sejarahnya di dunianya (Riyanto, 2018). Pemahaman manusia sebagai *Being-in-the-world* menunjukkan bahwa manusia tidak hanya berada di dalam dunianya namun memiliki relasi dan keterbukaan pada dunianya.

Komitmentnya pada isu gender mendorongnya untuk menyebarluaskan menyebarluaskan materi pelatihan di lembaganya yaitu LBH Bali. Namun, di tahap awal ia tidak mendapatkan dukungan dari koleganya di LBH Bali dan rekan-rekannya aktivis LSM lainnya. Oleh karena itu, Ibu Anggreni menjadikan Forum Komunikasi Mitra Kasih Bali sebagai wahana gerakan perempuan. Forum ini menggunakan wantilan DPRD Bali sebagai lokasi aksi kolektif mereka untuk menyuarakan keadilan gender.

Perhatian isu gender dari Ibu Anggreni mengalami perluasan dari awalnya memperhatikan isu KDRT. Saat ada KPU di tingkat daerah untuk pertama kalinya, ia melihat ada anggota KPU perempuan (Ibu Riniti) yang sering melibatkan aktivis perempuan untuk membicarakan tentang partisipasi perempuan dalam politik. Di tingkat nasional, Ibu Anggreni juga berjejaring dengan Koalisi Perempuan yang juga memperjuangkan perempuan dalam politik. Gerakan perempuan di Bali menjadi sinergi antara jaringan aktivis Forum Komunikasi Mitra Kasih Bali, KPU Provinsi Bali dan aktivis perempuan di Jakarta.

Gerakan perempuan dari Forum Komunikasi Mitra Kasih Bali menjadi semakin besar seiring dengan perubahan konstelasi politik yang menghasilkan norma tentang kuota perempuan dalam daftar caleg dengan kemunculan UU No. 12 Tahun 2013 tentang Pemilu. Ibu Anggreni, mengamati bahwa akibat dari peraturan tersebut semakin banyak lembaga-lembaga donor yang memberikan pembiayaan untuk pelatihan-pelatihan yang mendorong partisipasi perempuan

dalam politik. Muncul pula gerakan politik yang mendesak keharusan baginya ada kuota bagi perempuan dalam dalam daftar caleg. Seperti yang diutarakan Wolf, gerakan perempuan memerlukan keserasian antara satu kelompok gerakan dengan kelompok gerakan lainnya. Keterpaduan tersebut didasari oleh suatu persamaan dengan sekaligus tetap menjaga keberagaman diantara kelompok feminis. Di saat gerakan perempuan termobilisasi dengan bingkai baru, maka bingkai tersebut dapat diperbesar secara fleksibel (Wolf, 1999).

Perubahan pada struktur *funding* turut memberi andil bagi perubahan sikap LBH Bali. Sebelumnya, seluruh LBH dalam jaringan LBH Indonesia mendapatkan *funding* dari Belanda. Saat *funding* tersebut berhenti karena lembaga *funding* mengalihkan dananya di tempat lain, LBH Bali harus bisa *survive* dengan mengandalkan usahanya sendiri dalam mendapatkan *funding*. Ketersediaan *funding* untuk isu gender dan keterbukaan LBH Bali untuk melaksanakan program-program gender akhirnya bisa bertemu. LBH Bali mendapatkan pendanaan untuk pelaksanaan program-program gender yang dikoordinir oleh Ibu Anggreni. Keberadaan Forum Mitra Kasih Bali yang sudah lebih dulu melakukan gerakan perempuan kemudian dapat bersinergi dengan program-program dari LBH Bali yang menekankan pada aspek hukum dalam kekerasan terhadap perempuan. Program-program gender dari LBH Bali ini juga didukung oleh organisasi-organisasi di tingkat nasional yang bergerak di bidang gender. Mereka yang mendapatkan *funding* dari luar negeri meng-subkan proyek kegiatan kepada LBH Bali untuk program perdagangan manusia.

Identitas dirinya sebagai aktivis perempuan mengalami penguatan ketika isu kekerasan dalam rumat tangga (KDRT) yang diangkat oleh LBH Bali mendapatkan respons dari masyarakat. Ibu Anggreni terkejut dengan banyaknya perempuan yang menelpon saluran *hotline* yang disediakan oleh LBH Bali. Hal itu membuatnya menjadi semakin yakin bahwa KDRT adalah persoalan serius yang dialami oleh banyak perempuan. Respon dari perempuan korban KDRT, menunjukkan bahwa tindakan Ibu Anggreni mendapatkan pengakuan. Seperti yang dinyatakan Taylor (1992), identitas dibentuk oleh pengakuan oleh orang lain. Pengakuan tersebut memberikan martabat dan rasa hormat kepada yang bersangkutan.

Isu KDRT yang telah diangkat aktivis perempuan telah menarik perhatian media massa yang memberitakan tentang kasus kekerasan pada perempuan dan saluran-saluran pengaduan yang tersedia. Akibatnya, perempuan-perempuan yang merasa menjadi korban, memiliki ruang untuk bersuara untuk menyampaikan pengaduan kepada LBH Bali dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2). Ibu Anggreni yang saat itu bahkan sampai malam hari untuk melaporkan kasus KDRT (Foto 3). Terkait dengan hal ini, McLuhan menyebut istilah “medianya adalah pesannya”, yang merujuk

pada perubahan dalam masyarakat dan budaya yang mengindikasikan kehadiran pesan baru, yang merupakan efek dari medium ini (McLuhan, 1994). Pesan media massa yang memberitakan KDRT adalah bahwa fenomena ini terjadi secara luas di tengah masyarakat dan selama ini telah mengalami kebuntuan dalam saluran artikulasi kepentingan.



Foto 3. Ibu Anggreni dalam kegiatan penyuluhan hukum bagi kelompok marginal. (Sumber: Dokumentasi pribadi Ibu Anggreni).

Saat membuka *hotline* LBH Bali untuk isu-isu yang terkait dengan perempuan, Ibu Anggreni juga menerima pengaduan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan yang berhubungan dengan adat tradisi. Pernah ada perempuan yang mengadu padanya, menceritakan perempuan tersebut berdebat dengan mertuanya. Setelan perdebatan tersebut anaknya yang masih menyusui dibawa lari oleh mertuanya. Akibat ASI yang tidak mengalir, payu daranya menjadi bengkak. Hal itu terjadi karena sistem patrilineal di Bali yang memposisikan anak sebagai hak milik dari *purusha* yang umumnya adalah laki-laki. Atas dasar keluhan-keluhan yang ia terima, ia memproyeksikan ranah hukum adat sebagai arena yang penting untuk diperjuangkan agar perempuan mendapat keadilan. Keluhan-keluhan yang ia terima tentang KDRT juga mendorongnya bersama rekan-rekannya untuk mendirikan LBH APIK pada tahun 2009.

Eksistensi Ibu Anggreni sebagai aktivis gender didorong oleh interaksinya dengan aktivis gender dari Jakarta yang telah membuka wawasannya tentang masalah gender. Hal ini oleh McAdams disebut dengan "*cognitive liberation*" yang menjadi cikal bakal kemunculan aktor-aktor gerakan sosial. *Cognitive liberation* adalah perubahan kesadaran kognisi dari orang-orang yang akan melakukan gerakan sosial. Dengan *cognitive liberation*, aktor gerakan menyadari adanya

suatu ketidakadilan dan memiliki kesiapan untuk menentang ketidakadilan tersebut (McAdam, 1982). Upaya konter hegemoni atas penindasan, dilakukan oleh orang-orang terpelajar yang disebut Gramsci (1971) dengan istilah intelektual organik.

Berbeda dengan Ibu Anggreni, eksistensi dari narasumber Ibu Riniti sebagai aktivis gender didorong oleh keterlibatannya dengan kebijakan afirmasi UU No. 12 Tahun 2013 yang mendorong munculnya caleg perempuan dan munculnya norma untuk mendorong pengarusutamaan gender di semua lini. Pada tahun 2003, diadakan perekrutan KPU Provinsi Bali untuk yang pertama kalinya untuk mempersiapkan Pemilu tahun 2004. Menurut Ibu Riniti, yang menjadi unik dalam rekrutmen KPU itu adalah adanya afirmasi untuk mendorong 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar caleg. Norma itu begitu kuat sehingga juga berimbas dengan adanya dorongan bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu. Ibu Riniti kemudian terpilih sebagai anggota KPUD Provinsi Bali untuk masa jabatan 2003-2008.

Ia menyadari bahwa kesempatannya untuk terpilih tersebut adalah karena kebijakan afirmasi pengarusutamaan gender yang mendorong perempuan untuk terjun dalam jabatan-jabatan publik. Pengalamannya terpilih sebagai anggota KPU membuatnya memiliki komitmen untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Ia menyadari bahwa kebijakan afirmasi perempuan adalah buah jerih payah perjuangan dari aktivis-aktivis perempuan baik di tingkat nasional maupun daerah yang memproyeksikan Indonesia yang berkeadilan gender. Dalam hatinya, ia bertekad untuk memperjuangkan perempuan dalam bentuk *action* untuk membalas budi dan menghormati para aktivis yang telah memperjuangkan kebijakan afirmasi.

Ibu Riniti berkeyakinan bahwa perempuan harus mendapatkan kesetaraan dengan menggunakan kesempatan yang ada. Atas kesadaran itu, ia memperjuangkan representasi komisioner perempuan di KPU di tingkat kabupaten/kota di Bali. Kemudian ia dalam kapasitas sebagai komisioner KPU Provinsi, mendorong agar pengurus parpol di Bali bersedia mencalonkan perempuan sebagai caleg. Waktu itu untuk mendapatkan caleg perempuan bagi pengurus partai bukanlah perkara yang mudah. Sekalipun demikian ia tetap mendesak kepada pengurus partai di daerah, "Ayo Pak, mana calon perempuannya?".

Melihat adanya kesulitan untuk menghadirkan caleg perempuan, ia kemudian memiliki ide untuk mengumpulkan aktivis-aktivis perempuan. Waktu itu belum ada LSM yang secara spesifik mengusung isu perempuan. Ibu Riniti meminta aktivis-aktivis LSM (perempuan) untuk melakukan demonstrasi di kantor KPU Provinsi Bali untuk mendesak agar kuota 30 persen bagi caleg perempuan betul-betul diterapkan. Ibu Riniti sendiri yang meminta

agar mereka berdemonstrasi untuk mendesak KPU Provinsi untuk menekan partai-partai politik agar mencalonkan caleg perempuan untuk Pemilu 2004. Ia mengundang wartawan agar isu caleg perempuan itu terdengar oleh publik dan sekaligus memberikan tekanan pada pengurus parpol untuk mencalonkan caleg perempuan.

Ibu Riniti juga turun langsung untuk membela caleg perempuan dari PPP yang bernama Zubaidah. Kasusnya saat itu adalah Zubaidah sebenarnya menurut aturan, terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Bali, namun ia “diserobot” oleh caleg laki-laki yang ada di nomor urut di bawahnya. Ibu Riniti berjuang keras di KPU dan juga memanfaatkan media agar terus memantau kasus ini dan kemudian perjuangannya berhasil. Zubaidah akhirnya dapat dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Bali periode 2004-2009.

Kegiatan yang berhubungan dengan gender sebetulnya bukan hal yang sama sekali baru baginya. Sebelum menjadi aktivis gender, Ibu Riniti sebenarnya dalam lingkup pekerjaannya, sudah mengurus kegiatan yang berbasis gender. Ibu Riniti dari tahun 1985-2000 adalah ASN yang bertugas sebagai penyuluh pertanian di Balitbang yang sekarang bernama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Ia sudah terlibat dalam program-program kesetaraan perempuan di lembaga tersebut misalnya dalam menangani simpan pinjam pertanian dengan perempuan sebagai aktornya. Pada saat itu, ia terlibat dalam isu gender sebagai bagian dari program kantornya yang sudah mengusung pemberdayaan perempuan. Saat itu belum memiliki terpicirkan untuk melakukan tindakan-tindakan advokasi bagi kesetaraan gender.

Saat menjadi penyuluh pertanian, ia sudah memiliki pengetahuan tentang gender. Saat menjadi komisioner KPU Provinsi, ia kemudian mendapatkan cara berpikir yang lebih luas yaitu tentang kemanfaatan bagi publik terutama kaum perempuan yang sering mendapatkan ketidakadilan. Ibu Riniti berpikir dalam hatinya, “Saya tidak bisa paham saja tentang gender tanpa melakukan tindakan. Itu tidak akan berguna”. Kegigihannya untuk memperjuangkan representasi perempuan dalam politik kemudian membuatnya diakui oleh rekan-rekannya sebagai orang yang memperjuangkan kesetaraan perempuan dalam politik.

Menjadi komisioner KPU Provinsi adalah fase yang penting dalam eksistensinya sebagai aktivis perempuan. Disamping memulai tindakan advokasinya untuk keadilan gender, ia juga memperdalam pengetahuannya tentang gender. Ketika ia masih menjadi penyuluh pertanian, ia mengetahui kesetaraan gender sebagai pelaksanaan teknis pemberdayaan perempuan dalam pertanian. Di KPU, ia mendapat pengetahuan tentang landasan dari lahirnya kebijakan pengarusutamaan gender.

Ibu Riniti menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam posisinya di KPU baik dari segi masa jabatan maupun keterbatasan ruang lingkup sebagai

penyelenggara pemilu (Foto 4). Ia mulai memikirkan cara agar perjuangan kesetaraan gender ini tetap berlanjut saat ia sudah tidak lagi menjadi komisioner. Di tahun 2004, ia kemudian didorong oleh aktivis-aktivis perempuan seperti Ibu Anggreni dan kawan-kawan perempuannya dari parpol, untuk mendirikan LSM yang nantinya dapat menjadi wahana untuk “memprovokasi” gagasan kesetaraan gender dan khususnya mendorong perempuan untuk paham dan berpartisipasi dalam politik serta mendorong parpol untuk mencalonkan perempuan sebagai caleg dan merekrut perempuan sebagai pengurus partai.



Foto 4. Kegiatan para para aktivis perempuan di Kantor LSM Bali Sruti (Foto: Dokumentasi pribadi Ibu Luh Riniti).

4.3 Keterbukaan pada Berbagai Pilihan Hidup - Menjadi Otentik

Narasumber menyampaikan narasi yang menunjukkan mereka adalah subjek yang melalui proses penemuan diri menghasilkan berbagai alternatif jalan hidup. Heidegger menyatakan bahwa dalam sebagian besar dari waktunya, manusia larut dalam aktivitas keseharian (*fallenness*) sehingga tidak pernah mempertanyakan eksistensinya (misalnya, mempertanyakan apa makna menjadi seorang perempuan Bali?). Heidegger (2011) menyebutnya dengan istilah *das Man* yaitu manusia yang selalu menilai dirinya berdasarkan perkataan orang lain atau lingkungannya. Sebaliknya, menjadi manusia otentik, menurut Heidegger, adalah eksistensi yang di dalamnya manusia sadar dengan dirinya dan pilihan-pilihan dalam hidupnya. Manusia yang otentik memiliki kapasitas untuk menarik pelajaran dan mengajukan pertanyaan tentang makna eksistensinya dan menyadari adanya pilihan-pilihan hidup (Heidegger, 2011).

Seperti yang dialami oleh narasumber Ibu Riniti yang mengalami pergulatan dengan identitas dirinya dan mencari pilihan-pilihan dalam

eksistensinya. Ketika sudah mencapai karir yang mapan sebagai penyuluh madya di BPPT, ia merasakan kejenuhan bekerja dalam lingkungan birokrasi pemerintahan. Sebagai bagian dari hierarki birokrasi, ia harus menjalankan program yang sudah dirumuskan dari jenjang hierarki di atasnya. Sebagian besar dari waktunya habis dicurahkan untuk pekerjaannya. Terkadang harus pulang malam hari untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara itu, sebagai perempuan Bali dengan adat yang kuat, ia juga harus menjalankan adat istiadat, *menyama braya* (kegiatan dengan sanak saudara), dan untuk melaksanakan tanggung jawab di *merajan* (tempat suci pemujaan keluarga). Ia merasa kurang memiliki waktu untuk keluarga dan untuk menunaikan kewajiban adat dan agama.

Alasan keluarga pulalah yang menyebabkan Ibu Riniti untuk menolak permintaan dari institusinya untuk melanjutkan studi ke Australia. Ia juga menghindari permintaan dari institusi untuk melanjutkan studi di IPB Bogor. Keputusannya untuk menolak melanjutkan studi membuat insitusinya tidak senang. Ia mendengar bahwa ia akan dijatuhi sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat. Ia tidak terlalu memperdulikan ancaman sanksi dari insitusinya. Ia lebih memilih dekat dengan keluarga. Baginya sangat berat untuk berpisah dari keluarga, terlebih anak-anaknya yang masih kecil.

Di pekerjaannya sebagai penyuluh pertanian, ia merasa memiliki keterbatasan dalam menuangkan ide dan berinovasi karena harus mengikuti perintah dari jenjang hierarki di atasnya. Atas alasan itu, ia memutuskan untuk pindah dinas dari BPPT yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen (Non-Kementerian), ke Departemen Pendidikan untuk menjadi dosen. Dengan menjadi dosen, ia berharap memiliki lebih banyak ruang untuk berkegiatan dan memiliki lebih banyak waktu untuk melaksanakan kewajiban adat dan agama serta untuk keluarga. Keinginannya untuk menjadi dosen saat itu belum bisa terwujud karena ia belum menyanggah gelar S2. Agar memenuhi persyaratan tersebut dan juga dengan tetap tinggal bersama keluarganya, ia memutuskan untuk mengambil studi S2 di Denpasar. Dengan sambil bekerja, Ibu Riniti menempuh studi S2 dengan biaya sendiri. Program studi yang ia pilih adalah Program Studi Kajian Budaya di Universitas Udayana. Ia ingin mendalami masalah sosial budaya terutama adalah persoalan gender.

Ibu Riniti harus bernegosiasi pertama-tama dengan suaminya untuk membuka pilihan-pilihan dalam eksistensinya. Setelah menamatkan gelar S2 pada tahun 2000, ia mengajukan perpindahan pekerjaan ke Kopertis untuk menjadi dosen di Perguruan Tinggi di Bali. Ia meminta pada suaminya yang saat itu adalah Wakil Rektor di Universitas Ngurah Rai, agar diberikan kesempatan untuk menjadi dosen di Universitas Ngurah Rai. Suaminya sempat memintanya untuk mempertimbangkan kembali niatnya untuk menjadi dosen. Suaminya

menyebutkan bahwa ia sudah memiliki karier yang bagus sebagai penyuluh pertanian, menduduki jabatan pimpinan proyek, memiliki fasilitas mobil, tugas dan meja atau ruangan. Menjadi dosen kata suaminya, “Fasilitas minim dan mejapun tidak punya”. Disamping itu, di Universitas Ngurah Rai, tidak ada Fakultas Pertanian, yang sesuai dengan dasar dari bidang keilmuannya. Ibu Riniti kemudian menegaskan pada suaminya, “Bapak, kalau saya menjadi dosen dan tidak mendapatkan apa-apa, itu tidak apa. Yang penting saya bisa fleksibel dengan waktu. Saya bisa mengatur diri saya. Saya tidak diperintah-perintah”. Ia melihat kerabatnya yang menjadi dosen, memiliki banyak waktu senggang. Ia saat itu berpikir, “Kalau menjadi dosen, mau tidur boleh, mau lari boleh.” Artinya seorang dosen bisa melaksanakan tugas pokok saja dan juga bisa melakukan berbagai inovasi dan kreativitas.

Perpindahan pekerjaan untuk menjadi dosen adalah pergulatan yang besar dalam hidup. Ia harus berjuang keras untuk meyakinkan suaminya yang awalnya tidak menyetujui langkahnya. Ia menyatakan bahwa meskipun tidak ada Fakultas Pertanian di Universitas Ngurah Rai, namun itu bukanlah kendala. Ia menegaskan kembali bahwa ia adalah sarjana teknologi pertanian dengan gelar S2 kajian budaya, sehingga bisa masuk ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Ia sangat ingin untuk pindah menjadi dosen untuk mendapatkan ruang kebebasan dalam berinovasi. Ia tidak ingin lagi menjadi seorang birokrat. Setelah meyakinkan suaminya, ia akhirnya diizinkan untuk pindah menjadi dosen di Universitas Ngurah Rai. Ibu Riniti mendapatkan penempatan tugas di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Posisinya sebagai dosen itulah yang kemudian membuka jalan baginya untuk menjadi anggota KPU Provinsi Bali dan kemudian termotivasi untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Saat itu pegawai KPU berusaha untuk mencari calon komisioner perempuan melalui perguruan-perguruan tinggi. Di kala banyak dosen perempuan yang tidak bersedia untuk melamar, sebaliknya, Ibu Riniti, meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan politik dan kepemiluan, ingin mencoba melamar menjadi komisioner KPU untuk mencari tantangan baru.

Para aktivis perempuan harus bernegosiasi dengan struktur yang sangat dekat dengan kesehariannya yaitu lingkungan keluarga, untuk mendapatkan izin terjun ke arena gerakan gender. Mereka berhadapan dengan struktur-struktur sosial yang berhubungan dengan hidupnya. Struktur sosial menurut Giddens (1984) adalah kumpulan dari aturan dan sumber daya yang diorganisir sebagai properti dari sistem sosial. Struktur sosial itu dapat berupa norma-norma yang menjadi standar kepatutan dari suatu sistem sosial.

Narasumber Ibu Budawati menghadapi pergulatan identitas ketika berhadapan dengan struktur sosial. Ia dihadapkan pada pilihan untuk

melanjutkan aktivisme dalam gerakan kesetaraan gender ataukah menjadi ibu rumah tangga. Ia menyadari bahwa pandangan umum di masyarakat akan mengarahkannya untuk menjadi ibu rumah tangga sebagai posisi yang layak bagi perempuan Bali. Norma umum di masyarakat melihat dunia aktivisme adalah dunia yang penuh dengan pertikaian dan kontroversi sehingga menjadi dunia yang tidak cocok untuk perempuan. Ia juga menyadari bahwa suaminya tidak menginginkannya untuk aktif dalam gerakan gender. Suaminya yang adalah seorang pengusaha melihat aktivisme adalah dunia yang sarat dengan perdebatan yang menurutnya tidak penting dibandingkan dengan mengurus keluarga. Dalam hati Ibu Budawati, ia berpikir bahwa ia dapat menjalani dunia aktivisme dengan bernegosiasi untuk mengurus keluarga dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Ia tetap berusaha untuk meyakinkan suaminya agar ia diijinkan untuk kembali pada kegiatan aktivisme gender. Setelah menikah, ia sempat berhenti sementara dalam kegiatan gerakan gender. Perlu waktu 10 tahun baginya untuk mendapatkan izin dari suaminya. Suaminya juga memberikan restu untuknya dalam mendirikan mendirikan LBH APIK Bali pada tahun 2009.

5. Simpulan

Identitas naratif dari aktivis gerakan kesetaraan gender di Bali memberikan pemahaman tentang pemaknaan diri narasumber terhadap pengalamannya dan jalur perjalanan mereka menjadi aktivis perempuan. Ketertarikan narasumber untuk terlibat dalam gerakan perempuan bersumber dari pengamatannya saat usia remaja atas diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pemaknaannya tersebut mempengaruhi pilihan kegiatannya ketika mereka menginjak dewasa dengan memilih kegiatan di bidang pendampingan hukum dan juga jalur politik. Mereka melakukannya untuk mencari jawaban atas diskriminasi terhadap perempuan yang mereka amati dan untuk menunjukkan pembuktian bahwa struktur sosial yang selama ini melihat perempuan sebagai orang yang tidak berdaya dalam politik adalah pandangan yang keliru.

Narasumber termotivasi untuk terlibat dalam politik atas dasar keyakinan bahwa partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan publik akan menghasilkan kebijakan yang melindungi perempuan. Pemahaman tentang diri dan pemaknaan atas masa lalu dan orientasi ke masa depan, menjadi dasar dari pilihan untuk memasuki dunia gerakan dengan bahkan meninggalkan zona nyaman dalam pekerjaan sebelumnya. Hal itu juga mempengaruhi pilihan segmen gerakan perempuan yang ditempuh oleh narasumber. Ada yang berfokus pada kegiatan di partai politik, pendampingan kasus hukum pada perempuan korban kekerasan, dan pendidikan serta sosialisasi kesadaran gender kepada publik.

Pilihan untuk menjadi aktivis perempuan juga didasari oleh hasil interaksi orang lainnya. Mereka dapat terjun dalam gerakan perempuan setelah mendapatkan izin dari suami mereka. Narasumber merasa kesadarannya menjadi terbuka setelah mendapatkan penjelasan tentang keadilan gender dari aktivis perempuan tingkat nasional. Narasumber menghargai perjuangan gerakan perempuan di tingkat nasional yang telah mendorong munculnya peraturan yang memberi afirmasi pada perempuan sehingga sebagai bentuk apresiasi dan balas budi, narasumber meneruskan semangat gerakan perempuan di tingkat lokal di Bali. Keterlibatan aktif dari aktivis perempuan di Bali juga didorong oleh kapasitas mereka untuk melihat dukungan donatur internasional sebagai sumber daya dalam memperkuat gerakan kesetaraan gender di Bali. Penelitian ini secara praktis memberi manfaat bagi kaderisasi aktivis perempuan untuk mengambil pembelajaran dari kegigihan dan *reasoning* dari para aktivis untuk terjun dalam gerakan perempuan serta untuk melanjutkan aktivisme yang telah dilakukan oleh para narasumber. Penelitian ini membuka ruang baru yang dapat diteruskan oleh penelitian selanjutnya yaitu tentang relasi antara aktivis gerakan perempuan dalam LSM dan aktivis gerakan perempuan di tubuh parlemen.

Daftar Pustaka

- Ariyanti, N. M. P. and Ardhana, I. K. (2020). 'Dampak Psikologis Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan pada Budaya Patriarki di Bali', *Jurnal Kajian Bali*, 10(01), pp. 283–304.
- Darma Putra, I. N. (2007). *Wanita Bali Tempo Doeloe*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Dewi, I. S., Erviantono, T. and Bandiyah (2017) 'Gerakan Perlawanan Ideologi Patriarki di Bali dalam Karya Sastra Oka Rusmini Tahun 2000-2002', *Politika Udayana*, 1(1), pp. 1–15.
- Gelgel, N. M. R. A. and Apriani, K. D. (2019). 'Rendahnya Keterpilihan Perempuan pada Pemilu 2019 di Bali', *Jurnal Kajian Bali*, 09(02), pp. 263–287.
- Gelven, M. (1989). *A Commentary on Heidegger's Being and Time*. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- Gramsci, A. (1971). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*. New York: International Publishers.
- Heidegger, M. (2011). *Being and Time*. New York: Harper & Row.
- Kartika, I. M. (2017). 'Eksistensi Perempuan Bali dalam Politik', *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FKIP Universitas Dwijendra*.
- Keohane, R. O. and Nye, J. S. (2000). 'Governance in a Globalizing World', in Keohane, R. O. (ed.) *Power and Governance in a Partially Globalized World*. New

York: Routledge, pp. 193–218.

- Kurniasari, N. G. A. K. (2019). *Perempuan Hindu Bali sebagai Komunikator Politik (Studi Fenomenologi pada Perempuan Hindu Bali Sebagai Politisi, Aktivistis dan Profesional di Provinsi Bali)*. Universitas Padjadjaran.
- Laitinen, A. (2002). 'Charles Taylor and Paul Ricoeur on Self-Interpretations and Narrative Identity', in Heikkinen, H. and Syrjälä, L. (eds) *Narrative Research. Voices of Teachers and Philosophers*. Finland: SoPhi Academic Press, pp. 57–71.
- van Manen, M. (1990). *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. New York: State University of New York Press.
- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970*. Chicago: University of Chicago Press.
- McAdams, D. P. (2011). 'Narrative Identity', in Schwartz, S. J., Luyckx, K., and Vignoles, V. L. (eds) *Handbook of Identity Theory and Research*. New York: Springer, pp. 99-115.
- McLuhan, M. (1994). *Understanding Media: The Extensions of Man*. New York: MIT Press.
- Nakatani, A. (2003). 'Ritual as "Work": the Invisibility of Women's Socioeconomic and Religious Roles in a Changing Balinese Society', in Reuter, T. A. (ed.) *Inequality, Crisis and Social Change in Indonesia: The Muted Worlds of Bali*. London and New York: Routledge, pp. 119–144.
- Parmiti, D. P. (2017). 'Kesetaraan Gender dan Pergulatan Status Sosial Wanita Bali dalam Konstelasi Politik Praktis', *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 1(2), pp. 51–56.
- Ricoeur, P. (1988). *Time and Narrative III*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Sukiada, I. N. (2018). 'Antara Partisipasi dan Mobilisasi: Perempuan dalam Kacah Politik Praktis di Kabupaten Jembrana, Bali', *Jurnal Kajian Bali*, 08(01), pp. 215–236.
- Suprpta, I. N. (2020). 'Eksistensi Perempuan Buleleng di Kacah Politik Lokal: Suatu Perjuangan menuju Kesetaraan Gender', *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 12(1), pp. 70–83.
- Taylor, C. (1989). *Sources of the Self*. Cambridge: Harvard University Press.
- Taylor, C. (1992). 'The Politics of Recognition.', in *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 25–74.
- Wolf, N. (1999). *Geger Gender*. Yogyakarta: Pustaka Semesta Press.